



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI)**

**TANGGAL 16 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 18 (delapan belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 16 September 2015.
Pukul	: 13.50 WIB s/d 14.10 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. .
Acara	: Mendengarkan masukan/pandangan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 38 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota. - 4 orang dari APEKSI

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan APEKSI dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada APEKSI untuk memberikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari APEKSI mengenai penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Apeksi sangat mengapresiasi RUU yang berkaitan dengan daerah dan telah dibahas pada Tahun 2015 seperti RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pemda.
2. Diusulkan agar RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dapat segera dibahas untuk kepentingan daerah.
3. Berdasarkan daftar Prolegnas jangka menengah masih cukup banyak RUU yang belum dibahas dan membutuhkan waktu untuk membahasnya.
4. Kiranya dalam melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dapat memasukan RUU yang terkait dengan daerah untuk memperkuat otonomi daerah.
5. Perlu dipertimbangkan untuk merevisi UU tentang Jalan khususnya mengenai biaya pemeliharaan jalan agar diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
6. Terhadap permasalahan yang saat ini terjadi, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, kiranya perlu ada pengaturan mengenai calon tunggal, sehingga diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU tentang Pemda dan UU Pilkada.
7. Terkait dengan revisi UU tentang Perjanjian Internasional, kiranya dapat mengakomodir adanya *sister city* dimana terdapat perjanjian antara kota di Indonesia dengan kota di negara lain.

B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari APEKSI, sebagai berikut :

1. Hal-hal yang sudah disampaikan oleh Apeksi, sejalan dengan keinginan dari Badan Legislasi, kiranya setiap ada UU yang implementasinya melibatkan daerah akan meminta masukan/pandangan APEKSI.
2. Terkait dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, DPR telah banyak menerima keluhan dari daerah, khususnya mengenai *overlapping/tumpang tindih* pengaturandan perbedaan nomenklaturantara UU satu dengan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang tentang Pemda.
3. Kiranya perlu ada kesepakatan untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, dalam rangka mengakomodir usulan pengaturan mengenai calon tunggal.
4. Undang-undang yang diusulkan oleh APEKSI mengenai pembangunan megapolitan sejalan dengan masukan/pandangan narasumber lain yang

mengusulkan RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur untuk masuk dalam prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyetujui/menyepakati semua masukan/pandangan dari APEKSI akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB

Jakarta, 16 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001